



SAJJANA: Public Administration Review

Beranda

Journal: <https://talenta.usu.ac.id/sajjana>



Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pelayanan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Medan

Maulida Rahmayani, Erika Revida²

¹Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

²Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: erika@usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 09 Mei 2025

Revised 18 Mei 2025

Accepted 02 Juni 2025

Available online:

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

E-ISSN: XXX

P-ISSN: XXX

How to cite:

Rahmayani.M., & Revida. E. (2025) Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pelayanan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Medan: *Public Administration Review*, 3(1)

ABSTRAK

Fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang didukung oleh dana Bantuan Operasional Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Medan masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pelayanan dana Bantuan Operasional Kesehatan, pengaruh transparansi terhadap pelayanan dana Bantuan Operasional Kesehatan, serta pengaruh akuntabilitas dan transparansi secara simultan terhadap pelayanan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian adalah 60 orang yang dipilih dengan menggunakan teknik simple random sampling. Data primer diperoleh melalui kuesioner, sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pelayanan dana Bantuan Operasional Kesehatan. Transparansi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pelayanan dana Bantuan Operasional Kesehatan. Secara simultan, akuntabilitas dan transparansi menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan dana Bantuan Operasional Kesehatan, dengan hubungan yang erat antara kedua variabel independen terhadap variabel dependen. Rekomendasi yang diajukan kepada Dinas Kesehatan Kota Medan agar meningkatkan akuntabilitas melalui pelaporan yang lebih rinci dan transparansi dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh pihak terkait.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pelayanan Dana Bantuan Operasional Kesehatan

ABSTRACT

The growing phenomenon shows that the quality of health services supported by the Health Operational Assistance fund at the Medan City Health Office still faces various challenges in implementing the principles of good governance. This study aims to analyze the effect of accountability on the service of the Health Operational Assistance fund, the effect of transparency on the service of the Health Operational Assistance fund, and the effect of accountability and transparency simultaneously on the service of the Health Operational Assistance fund at the Medan City Health Office. This study uses a quantitative approach. The research sample was 60 people selected using a simple random sampling technique. Primary data were obtained through



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

questionnaires, while secondary data were obtained through literature studies. Data analysis was carried out using validity tests, reliability tests, classical assumption tests, and multiple linear regression analysis. The results of the study showed that accountability had a significant effect on the service of the Health Operational Assistance fund. Transparency also had a significant effect on the service of the Health Operational Assistance fund. Simultaneously, accountability and transparency showed a significant effect on the service of the Health Operational Assistance fund, with a close relationship between the two independent variables and the dependent variable. Recommendations submitted to the Medan City Health Office are to improve accountability through more detailed reporting and transparency by providing information that is easily accessible to related parties.

Keywords: *Accountability, Transpaancy, Health Operational Assistance Fund Management*

1. Pendahuluan

Kesehatan adalah aspek fundamental dalam pembangunan bangsa, memainkan peran sentral dalam meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya sektor ini dan telah berkomitmen untuk menyediakan dukungan finansial melalui berbagai program untuk memperbaiki dan memperluas layanan kesehatan. Salah satu program kunci dalam konteks ini adalah Bantuan Operasional Kesehatan, yang dirancang untuk mendukung operasional Puskesmas di seluruh Indonesia sebagai penyedia layanan kesehatan dasar yang paling dekat dengan masyarakat.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang diberikan untuk memastikan bahwa Puskesmas dapat menjalankan fungsinya dengan efektif, adalah instrumen vital dalam upaya untuk menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang terlayani. Namun, keberhasilan dari program ini tidak hanya bergantung pada besarnya dana yang dialokasikan, tetapi juga pada bagaimana dana tersebut dikelola dan dampaknya pada kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Di Dinas Kesehatan Kota Medan, seperti halnya di banyak daerah lainnya, penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan menghadapi berbagai tantangan dalam hal penerapan prinsip-prinsip good governance, khususnya terkait akuntabilitas dan transparansi, yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan.

Tantangan ini mencerminkan pentingnya upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan agar dapat mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan menerapkan tata kelola yang baik, Dinas Kesehatan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi. Teori good governance menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus mencakup akuntabilitas dan transparansi sebagai dua pilar utama untuk meningkatkan pelayanan publik. Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab pemerintah dalam memberikan laporan yang jelas dan terperinci mengenai penggunaan dana publik kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan.

Keterkaitan antara prinsip-prinsip good governance dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sangat relevan. UUD 1945, sebagai konstitusi negara, menegaskan komitmen untuk menyelenggarakan perekonomian dan sumber daya negara untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian harus diselenggarakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan seluruh sumber daya alam serta fasilitas negara harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ketentuan ini mencerminkan kebutuhan untuk pengelolaan sumber daya publik yang adil dan akuntabel. Selain itu, Pasal 28D UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif. Prinsip-prinsip good governance, yaitu akuntabilitas dan transparansi, sejalan dengan ketentuan konstitusi ini, yang mengharuskan pemerintah untuk menyelenggarakan pengelolaan dana publik dengan cara yang terbuka, akuntabel, dan bertanggung jawab demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Revida, dkk, 2024).

Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih baik dan bebas dari korupsi semakin mendesak, terutama dalam sektor kesehatan yang langsung berhubungan dengan kebutuhan dasar

masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi bukan hanya penting untuk mencegah penyalahgunaan dana, tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah terbuka dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana publik, mereka lebih cenderung mendukung kebijakan serta program yang dijalankan (Revida & Purba, 2018).

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan asosiatif. Menurut Sugiyono (2021:16) penelitian kuantitatif merupakan cara atau metode penelitian yang didasarkan kepada filsafat positivisme, penggunaannya untuk meneliti pada sampel ataupun populasi tertentu, pada umumnya teknik pengambilan dilaksanakan dengan cara acak atau random, pengumpulan data memanfaatkan instrumen penelitian, analisis data memiliki sifat kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antar dua variabel atau lebih dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat analisis. Hubungan antar variabel yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pelayanan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada dinas kesehatan Kota Medan.

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Medan pada Jalan Rotan, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 2011. Sedangkan pelaksanaan penelitian dijadwalkan pada bulan September-November 2024.

2.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2022:215) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terbentuk dari subjek atau objek yang memiliki karakteristik serta kualitas tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti supaya dapat dipelajari serta kemudian kesimpulannya dapat diambil. Populasi pada dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan Dana BOK di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan yang berjumlah 150 pegawai.

Penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* dalam pengambilan sampel. Menurut Sugiyono (2022:81), *probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik *probability sampling* yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *simple random sampling*. Banyaknya sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan perhitungan rumus Slovin yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Oleh karena itu, pengambilan sampel ini digunakan rumus:

Slovin (dalam Sugiyono, 2017:18) dengan rumus $n = \frac{N}{1+N(e)^2}$

Keterangan:

n= Jumlah anggota sampel

N= Jumlah populasi

e= Persentase kesalahan dalam pengambilan sampel sebesar 10%

Menurut persamaan diatas, penentuan sampel pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{150}{1 + 150(0,10)^2} = 60$$

Jumlah sampel pada penelitian ini yang harus diambil dari besar populasi berjumlah 150 orang pegawai adalah sebesar 60 orang pegawai.

2.3 Skala Pengukuran Variabel

Menurut Sugiyono (2021: 146) skala likert digunakan dalam mengukur pendapat, persepsi, dan sikap individu atau kelompok mengenai fenomena sosial. Dalam penentuan skor, penulis menggunakan alat pengukuran yang akan ditampilkan.

Tabel 1. Instrumen Skala Likert

No	Pernyataan	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Kurang Setuju (KS)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2021:147)

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data Primer
Pada penelitian ini penulis menggunakan kuesioner yang akan dibagikan kepada pegawai di Kantor Dinas Kesehatan Kota Medan dan Masyarakat yang terlibat.
2. Pengumpulan data Sekunder
Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian terdahulu, dan data-data yang diperoleh dari Kantor Dinas Kesehatan Kota Medan.

2.5 Teknik Analisis Data

2.5.1 Uji Instrumen

Uji instrumen dibutuhkan ada penelitian agar dapat memastikan instrumen yang digunakan ada penelitian menggunakan alat ukur yang tepat serta dapat dipercaya. Penelitian ini menggunakan dua bentuk pengujian yaitu uji reliabilitas dan uji validitas.

1. Uji Validitas
Uji validitas bertujuan untuk mengukur valid ataupun sah tidaknya kuesioner. Sebuah kuesioner ataupun instrumen bisa dinyatakan sah apabila pertanyaan di kuesioner atau instrumen bisa menjelaskan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner (Ghozali, 2018:51). Uji validitas bisa dinyatakan valid jika signifikan $< 0,05$ atau 5%. Adapun kriteria penilaian uji validitas adalah:
 - a. Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka instrumen tersebut valid.
 - b. Apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka instrumen tersebut tidak valid.
2. Uji Reliabilitas
Menurut Ghozali (2018:45) Uji reliabilitas merupakan alat dalam memperkirakan suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. *Cronbach Alpha* lebih besar dari dari taraf signifikan sebesar 60% atau 0,6 maka variabel dikatakan reliabel. Namun jika hasil *Cronbach Alpha* kurang dari taraf signifikan 60% ataupun 0,6 maka variabel dianggap tidak reliabel.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2018: 159) uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linear berganda.

1. Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2018:160) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi variabel residual ataupun pengganggu terdapat distribusi normal. Penelitian ini memanfaatkan Normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual* maupun grafik plot dan uji non statistik *Kolmogorov Smirnov*. Adapun kriterianya yaitu:
 - a. Apabila nilai Signifikansi (Sig.) $< 0,05$ berarti distribusi sampel tidak normal.
 - b. Apabila nilai Signifikansi (Sig.) $> 0,05$ berarti distribusi sampel adalah normal.
2. Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali (2018:176) tujuan dari uji multikolinearitas untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya interkorelasi (hubungan yang kuat) antar variabel bebas (independen). Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda yang berarti akan mempengaruhi variabel terikatnya (dependen). Pendugaan tersebut akan dapat

dipertanggungjawabkan apabila tidak terjadinya interkorelasi (multikolinearitas) antara variabel-variabel independen. Adanya hubungan linear antara variabel independen akan mengakibatkan kesulitan dalam memisahkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi interkorelasi diantara variabel independen (tidak adanya multikolinearitas). Untuk menguji multikolinearitas adalah dengan menggunakan metode *Tolerance* VIF (*Variance Inflation Factor*) masing-masing variabel independen. Adapun kriterianya sebagai berikut:

- a. Jika Nilai *Tolerance* Lebih besar $> 0,10$ maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinearitas.
 - b. Jika nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinearitas.
3. Uji Heteroskedastisitas
- Menurut Ghozali (2018:165) Uji heteroskedastisitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengaturan. Apabila asumsi tidak terjadinya heteroskedastisitas ini tidak terpenuhi, maka akan berakibat pada sebuah keraguan atau ketidakakuratan pada suatu hasil analisis regresi yang dilakukan. Suatu model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas.

2.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda pada penelitian bertujuan agar menguji pengaruh dua variabel bebas kepada variabel terikat yang diformulasikan pada bentuk persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pengelolaan Dana BOK

X_1 = Akuntabilitas

X_2 = Transparansi

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi X_1

β_2 = Koefisien regresi X_2

e = Nilai Residu

2.7 Uji Hipotesis

2.7.1 Penguji Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial atau pengaruh antar tiap variabel independen terhadap variabel dependen apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% atau sebesar 0.05 (*two tailed test*) dengan derajat bebas $df = n - k = 52$, maka dapat diperoleh nilai T_{tabel} sebesar 1.674 (didapat dari T_{tabel}). Pengambilan keputusan pada Uji didasarkan oleh:

1. $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat atau H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat atau H_0 ditolak dan H_a diterima.
3. Apabila probabilitas (sig.) < 0.05 maka H_0 ditolak.
4. Apabila probabilitas (sig.) > 0.05 maka H_0 diterima.

2.7.2 Pengujian Simultas (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel secara keseluruhan terhadap variabel dependen dan dilakukan untuk mengetahui pengaruh tersebut secara signifikan. Pengambilan keputusan pada uji F didasarkan oleh:

1. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y), maka H_0 ditolak.
2. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y), maka H_a diterima.
3. Apabila signifikansi (sig.) $< 0,05$ maka H_0 ditolak.
4. Apabila signifikansi (sig.) $> 0,05$ maka H_a diterima.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pelayanan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Medan

3.1.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pelayanan Dana Bantuan Operasional Kesehatan

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan program SPSS, pada variabel akuntabilitas (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan dana bantuan operasional kesehatan (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} lebih besar dibanding t_{tabel} dengan tingkat signifikansi $p < 0.05$. Selain koefisien regresi variabel akuntabilitas menunjukkan nilai positif. Artinya, peningkatan kualitas pelayanan dana Bantuan Operasional Kesehatan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan dana Bantuan Operasional Kesehatan.

Hasil pengujian hipotesis mendukung bahwa H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa Akuntabilitas memiliki hubungan kausal yang signifikan terhadap kualitas pelayanan dana Bantuan Operasional Kesehatan. Dalam konteks ini, akuntabilitas mencakup tanggung jawab institusi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada pihak yang berwenang. Hasil ini, menguatkan peran penting akuntabilitas dalam tata kelola dana publik, khususnya dalam memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan perencanaan awal, efektif, dan efisien (Revida, dkk, 2023).

Seluruh indikator dalam variabel independen akuntabilitas (X_1) dinyatakan valid dan reliabel melalui uji validitas dan reliabilitas, sehingga indikator tersebut layak digunakan dalam analisis penelitian. Keberhasilan indikator ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas tidak hanya menjadi faktor administratif, tetapi juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dalam variabel dependen, indikator pelayanan dana BOK (Y) juga terbukti valid dan reliabel, menunjukkan bahwa pengukuran kualitas pelayanan yang dilakukan sesuai dengan standar akademik dan metodologi yang diterapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Jalil (2014), yang menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban institusi untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk pengelolaan kepada pihak berwenang, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Jalil (2014) juga menjelaskan bahwa akuntabilitas sering diidentikkan dengan konsep tanggung jawab (responsibility), kemampuan memberikan jawaban (answerability), dan keterikatan hukum (reliability). Dengan kata lain, akuntabilitas merupakan elemen dasar dalam administrasi publik yang mencerminkan sejauh mana institusi mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan ini juga mendukung literatur yang menyebutkan bahwa akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme untuk mengontrol, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja institusi public (Revida, dkk, 2022). Dalam pengelolaan dana BOK, akuntabilitas memungkinkan terwujudnya transparansi dalam pelaporan keuangan, mendorong pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan dana. Akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, sehingga pengelolaan dana BOK dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOK memberikan kontribusi positif terhadap pelayanan yang lebih baik. Hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Kesehatan Kota Medan perlu terus meningkatkan akuntabilitas melalui pelaporan yang lebih transparan, pengawasan yang ketat, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan dana BOK dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama, yaitu mendukung kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

3.2. Pengaruh Transparansi Terhadap Pelayanan Dana Bantuan Operasional Kesehatan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan program SPSS, variabel transparansi (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan dana Bantuan Operasional Kesehatan (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} yang lebih besar dibandingkan t_{tabel} dengan tingkat signifikansi $p < 0.05$, serta nilai koefisien regresi yang bernilai positif. Artinya semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan, semakin meningkat pula kualitas

pelayanan yang diberikan. Transparansi berperan penting dalam menciptakan keterbukaan informasi yang memungkinkan semua pihak yang berkepentingan memahami pengelolaan dana secara jelas dan dapat dipercaya (Revida, Munthe & Purba, 2022).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak, yang mengindikasikan bahwa transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap pelayanan dana Bantuan Operasional Kesehatan. Transparansi dalam pengelolaan dana mencakup penyediaan informasi yang akurat, aksesibilitas laporan keuangan, serta komunikasi yang terbuka terkait alokasi dan penggunaan dana (Revida, dkk, 2023). Dengan transparansi yang baik, pemangku kepentingan dapat memantau proses pengelolaan dana, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Seluruh indikator dalam variabel transparansi (X2) dinyatakan valid dan reliabel melalui uji validitas dan reliabilitas, sehingga layak digunakan dalam penelitian ini. Indikator transparansi mencakup keterbukaan informasi, kemudahan akses terhadap laporan penggunaan dana, serta penyampaian data yang akurat kepada masyarakat dan pihak terkait. Indikator-indikator ini tidak hanya memperkuat pengelolaan dana, tetapi juga mencerminkan pentingnya tata kelola yang baik dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.

Hasil penelitian ini selaras dengan definisi yang disampaikan oleh Mardiasmo (2014), yang menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, termasuk dalam pengelolaan dana publik. Informasi yang terbuka ini memungkinkan masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi penggunaan dana, sehingga dapat menciptakan sistem pengelolaan yang lebih bertanggung jawab dan efisien. Dalam konteks pengelolaan dana BOK, transparansi menjadi elemen kunci yang memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan program.

Temuan ini mendukung literatur yang menekankan pentingnya transparansi sebagai salah satu prinsip utama dalam tata kelola yang baik. Transparansi memungkinkan setiap tahapan dalam pengelolaan dana, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dapat diawasi secara terbuka oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan transparansi, informasi terkait alokasi dan realisasi dana dapat diakses oleh publik, sehingga memperkuat legitimasi dan efektivitas program. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana BOK di Dinas Kesehatan Kota Medan diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

3.3 Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pelayanan Dana Bantuan Operasional Kesehatan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan program SPSS, diketahui bahwa variabel akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai F_{hitung} yang lebih besar dibandingkan dengan F_{tabel} pada tingkat signifikansi tertutup ($p < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan dana Bantuan Operasional Kesehatan.

Uji hipotesis secara simultan mengindikasikan bahwa H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana dilakukan sesuai dengan perencanaan dan dapat dipertanggungjawabkan sementara transparansi menjamin keterbukaan informasi sehingga penggunaan dana dapat diawasi secara efektif. Sinergi antara kedua variabel ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan mampu mengukur konsep yang diteliti secara konsisten dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, seluruh indikator yang digunakan dalam variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan pelayanan dana BOK (Y) dinyatakan valid dan reliabel, sehingga layak digunakan dalam penelitian ini. Validitas dan reliabilitas ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan mampu mengukur konsep yang diteliti secara konsisten dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil penelitian ini mendukung prinsip tata kelola keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa pengelolaan dana publik harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks pengelolaan dana BOK, akuntabilitas memastikan adanya pertanggungjawaban atas

pengelolaan dana, sementara transparansi memastikan bahwa informasi terkait pengelolaan tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kedua prinsip ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem pengelolaan dana yang lebih efektif dan efisien.

Penelitian ini sejalan dengan literatur yang menyebutkan bahwa kombinasi akuntabilitas dan transparansi mampu meningkatkan kualitas pelayanan public (Revida & Munthe, 2020). Dengan adanya akuntabilitas, setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan, sementara transparansi memberikan aksesibilitas informasi yang mempermudah pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, penerapan kedua prinsip ini secara simultan di Dinas Kesehatan Kota Medan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dana BOK, sehingga tujuan program dalam mendukung kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan dapat tercapai secara optimal.

4. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pelayanan dana bantuan operasional kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan yang tepat waktu dan sesuai prosedur meningkatkan kepercayaan dan efisiensi pengelolaan dana.
2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pelayanan dana bantuan operasional kesehatan. Penyampaian informasi yang jelas dan aksesibilitas data terkait dana Bantuan Operasional Kesehatan membantu masyarakat memahami proses peningkatan akuntabilitas instansi.
3. Secara simultan, akuntabilitas dan transparansi berkontribusi secara signifikan terhadap pelayanan Bantuan Operasional Kesehatan. Sinergi kedua variabel ini menciptakan tata kelola yang lebih baik, sehingga mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menyarankan kepada Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan memfokuskan pada:

1. Dinas Kesehatan Kota Medan disarankan untuk terus memastikan pelaporan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
2. Dinas Kesehatan perlu menyediakan akses informasi yang lebih luas dan jelas kepada masyarakat terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan. Ini mencakup publikasi laporan keuangan secara berkala melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.
3. Sinergi antara akuntabilitas dan transparansi harus diperkuat melalui penerapan prinsip-prinsip good governance. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan dana dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Referensi

Buku

- Abdullah, S. (2017). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arisaputra, R. (2013). *Good Governance dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Grasindo.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Basrowi, S. M. (2024). *Manajemen Administrasi Publik*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Halim, A. (2007). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Imawan, L., dan dkk. (2019). *Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Anggaran*. Jakarta: Penerbit Pustaka.
- Jalil, M. (2014). *Teori dan Praktik Akuntabilitas Pemerintah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Krina, S. (2013). *Prinsip Transparansi dalam Administrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo, M. (2014). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Revida, E., & Purba, S. (2018). Community participation based on social capital to enhance tourist visit at Lake Toba Parapat North Sumatera. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 52, p. 00015). EDP Sciences.
- Revida, E., & Munthe, H. M. (2020). Implementation model of tourism village policy to enhance community participation at meat tourism village Toba Samosir North Sumatra.
- Revida, E., Ismail, R., Lumbanraja, P., Trimurni, F., Sembiring, S. A. B., & Purba, S. (2022). the effectiveness of attractions in increasing the visits of Tourists in Samosir, North Sumatera. *Journal of Environmental Management & Tourism*, 13(8), 2240-2247.
- Revida, E., Munthe, H. M., & Purba, S. (2022). Increasing tourist visits through the development model of tourism village based on local culture. *Journal of Environmental Management & Tourism*, 13(4), 1151-1160.
- Revida, E., Ismail, R., Lumbanraja, P., Trimurni, F., Sembiring, S. A. B., & Purba, S. (2023). Village Owned Enterprises Governance (BUMDes) Based on the Tourism Village Development. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(10), 3341-3346.
- Revida, E., Kusmanto, H., Nasution, M. A., & Purba, S. (2024). Enhancing Tourist Village Quality Through Community Behavior Models. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 19(6).
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supomo, B. & Indriyo, G. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Salle, H. (2016). *Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sujarweni, V. (2015). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Administrasi Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sayuti, T., dan dkk. (2018). *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Teguh Kurniawan. (2003). *Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Cendekia.

Jurnal/Skripsi

- Amrullah, R. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa-Desa Di Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah)*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Fazila, N. A. (2023). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.
- Mulia, R. A., & Meilina, S. (2023). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 2(2), 93-103.

- Munawaroh, M., Herawaty, N., & Yustien, R. (2024). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa Di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 6525-6541.
- Sa'adah, L., & Syadeli, M. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Melalui Kualitas Pelayanan (Studi Pada Desa-desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang).
- Yesi Yulia Andika, R. A. (2023). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan STISIP Imam Bonjol (SIMBOL)*, 59.

Regulasi

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.